BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *flexing* atau pamer kekayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun pihak keluarga terkait memberikan dampak yang serius terhadap integritas dan citra ASN yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pengaturan perilaku Aparatur Sipil Negara terkait *flexing* sebagian besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut menekankan pada pentingnya etika dan kedisiplinan seorang Aparatur Sipil Negara, termasuk dalam menggunakan media sosial. Namun faktanya sampai saat ini masih belum ada undang-undang khusus yang lebih spesifik dan tegas mengatur perilaku *flexing* di media sosial.
2. Implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku *flexing* ASN di media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta prosedur yang tidak selalu konsisten. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang mengatur, ketiadaan undang-undang khusus

yang secara eksplisit mengatur perilaku *flexing* mengakibatkan penegakan disiplin seringkali tidak optimal.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil riset yang akan dilakukan, maka saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Disarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur perilaku Aparatur Sipil Negara di media sosial, termasuk larangan *flexing* atau pamer kekayaan. Undang-undang ini harus mengatur secara spesifik dan tegas mencakup definisi perilaku yang dilarang dan jenis sanksi yang dapat diterapkan apabila melanggarnya.
2. Agar Pengawasan dan penegakan disiplin menjadi kuat memerlukan upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan ketat, sistem pelaporan yang transparan, serta penegakan disiplin yang tegas, diharapkan perilaku pamer kekayaan di kalangan Aparatur Sipil Negara dapat diminimalkan. Dengan peningkatan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga pengawas diharapkan untuk memastikan adanya sinergi yang efektif dalam pengawasan dan penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan *flexing*.